

INTERSEKSIONALITAS PEMIKIRAN STRATEGIS DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN BERBASIS BUKTI

INTERSECTIONALITY OF STRATEGIC THINKING AND EVIDENCE-BASED DEFENSE POLICY MAKING

Aris Sarjito^{1*}, Guntur Eko Saputro²

^{1,2}Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 14, Jakarta 10340,
Indonesia

*Korespondensi: Aris Sarjito. Email: arissarjito@gmail.com
(Diterima: 06-12-2023; Ditelaah: 24-02-2024; Disetujui: 29-03-2024)

ABSTRACT

In an era characterized by rapid geopolitical shifts and evolving security threats, the imperative for evidence-based defense policymaking has never been more pressing. This research delves into the intricate nexus between strategic thinking and empirical evidence in defense policy formulation, seeking to address key gaps in understanding and practice. Through a qualitative analysis of secondary data encompassing scholarly literature, governmental reports, and defense policy documents, this study elucidates the fundamental elements of strategic thinking within defense policymaking frameworks and examines their current integration with empirical evidence. The research findings shed light on the pivotal role of strategic foresight, threat assessment methodologies, and resource allocation strategies in shaping defense policy. Moreover, the study explores the impact of intersectionality, encompassing factors such as geopolitical dynamics, technological advancements, and socioeconomic disparities, on the effectiveness of strategic thinking and the utilization of empirical evidence in defense policy making processes. The novelty lies in the comprehensive exploration of intersectionality's impact on defense policy formulation and the identification of guiding principles to enhance the integration of strategic thinking and empirical evidence. The research underscores the need for a holistic approach that acknowledges and addresses the multifaceted nature of contemporary security challenges.

Keywords: Defense Policy Making, Evidence-Based, Intersectionality, Strategic Thinking

ABSTRAK

Di era yang ditandai dengan pergeseran geopolitik yang cepat dan ancaman keamanan yang terus berkembang, pentingnya pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti menjadi semakin mendesak. Penelitian ini menyelidiki hubungan rumit antara pemikiran strategis dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan pertahanan, yang berupaya mengatasi kesenjangan utama dalam pemahaman dan praktik. Melalui analisis kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup literatur ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan pertahanan, penelitian ini menjelaskan elemen fundamental pemikiran strategis dalam kerangka pembuatan kebijakan pertahanan dan mengkaji integrasinya saat ini dengan bukti empiris. Temuan-temuan penelitian ini menyoroti peran penting pandangan ke depan yang strategis, metodologi penilaian ancaman, dan strategi alokasi sumber daya dalam membentuk kebijakan pertahanan. Selain itu, studi ini mengeksplorasi pengaruh interseksionalitas, yang mencakup faktor-faktor seperti dinamika geopolitik, kemajuan teknologi, dan kesenjangan sosial-ekonomi, terhadap efektivitas pemikiran strategis dan pemanfaatan bukti empiris dalam proses pembuatan kebijakan pertahanan. Hal baru terletak pada eksplorasi komprehensif mengenai dampak interseksionalitas terhadap perumusan kebijakan pertahanan dan identifikasi prinsip-prinsip panduan untuk meningkatkan integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang mengakui dan mengatasi sifat beragam tantangan keamanan kontemporer.

Kata Kunci: Basis Bukti, Interseksionalitas, Pembuatan Kebijakan Pertahanan, Pemikiran Strategis

PENDAHULUAN

Pada masa kini, pembuatan kebijakan pertahanan telah menjadi ranah yang semakin kompleks dan ditandai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang saling terkait (General, 2022; W. Wang et al., 2022). Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian, mengeksplorasi interseksionalitas penting antara pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti. Dengan mengkaji hubungan antara kedua elemen ini, akan diperoleh wawasan tentang bagaimana para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi pertahanan yang efektif dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Pemikiran strategis mengacu pada proses mengembangkan rencana jangka panjang dan membuat keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Evans, 2016; Weyhrauch & States, 2017). Dalam pembuatan kebijakan pertahanan, pemikiran strategis melibatkan pemahaman lanskap geopolitik, mengidentifikasi potensi ancaman, dan menentukan respons yang tepat (Klinke, 2015; Steff, 2016). Hal ini memerlukan kejelian, kreativitas, dan kemampuan mengantisipasi tantangan di masa depan.

Pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti mengadopsi pendekatan yang ketat dan sistematis, mengandalkan data yang kredibel, penelitian empiris, dan analisis pakar untuk memandu proses pengambilan keputusan (Laurin, 2014). Dengan mengintegrasikan informasi yang objektif dengan keahlian dan penilaian pembuat kebijakan, kebijakan akan lebih didasarkan pada kenyataan dan terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan pertahanan nasional.

Titik temu antara pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti terletak pada integrasi informasi kualitatif dan kuantitatif dengan pandangan ke depan yang strategis (Wilkinson, 2017). Pemikiran strategis memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengonseptualisasikan tujuan jangka panjang dan mengantisipasi potensi tantangan, sementara pendekatan berbasis bukti memberikan bukti empiris yang dapat diandalkan, analisis statistik, dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis data (lihat Gambar 1).



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Gambar 1. Diagram Venn Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti

Manfaat mengintegrasikan pemikiran strategis dengan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti adalah:

1. Pendekatan holistik: Kombinasi pemikiran strategis dan pendekatan berbasis bukti memberikan pemahaman yang inklusif dan komprehensif mengenai kebutuhan pertahanan, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi seperti faktor politik,

- ekonomi, sosial, dan teknologi (Armstrong & Green, 2017).
2. Pengambilan keputusan yang terinformasi: Pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti melengkapi pemikiran strategis dengan menyediakan data dan analisis yang andal bagi para pembuat kebijakan, sehingga memungkinkan mereka mengevaluasi efektivitas dan kelayakan kebijakan-kebijakan potensial (Angerschmid et al., 2022).
 3. Mitigasi risiko: Integrasi pemikiran strategis dan pendekatan berbasis bukti membantu mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan kerentanan, sehingga memungkinkan diambilnya tindakan proaktif (Wright et al., 2016).
 4. Alokasi sumber daya yang efisien: Pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti memungkinkan para pembuat kebijakan untuk memprioritaskan sumber daya berdasarkan informasi yang objektif, sehingga memastikan alokasi optimal untuk dampak maksimal (Razma, 2023).
 5. Ketersediaan dan keakuratan data: Ketersediaan data yang terbatas dan potensi bias dalam sumber data dapat menghambat efektivitas pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti (Waddell et al., 2014).
 6. Ancaman di masa depan yang tidak dapat diprediksi: Pemikiran strategis harus terus beradaptasi dengan ancaman yang muncul dan kemajuan teknologi, yang mungkin menimbulkan tantangan jika hanya mengandalkan data atau bukti historis (Criado-Perez et al., 2022).
 7. Menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang: Mencapai

keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan tujuan strategis jangka panjang sangatlah penting dalam pembuatan kebijakan pertahanan (Cairney, 2016).

Interseksionalitas pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti memberikan kerangka kerja yang kuat bagi para pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi pertahanan nasional yang efektif. Dengan mengintegrasikan pandangan ke depan strategis dan pendekatan berbasis bukti yang ketat, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan secara proaktif mengatasi ancaman yang muncul. Meskipun terdapat tantangan, kemajuan dalam pengumpulan data, teknik analisis, dan evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pembuatan kebijakan pertahanan secara keseluruhan, menjaga keamanan nasional di dunia yang terus berubah.

Dalam lanskap keamanan global yang terus berkembang, para pembuat kebijakan menghadapi tugas berat dalam mengambil keputusan penting dalam kebijakan pertahanan. Pemikiran strategis dan pendekatan berbasis bukti merupakan dua pilar yang mendasari pembuatan kebijakan pertahanan yang efektif (Steenkamp, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk membenarkan pentingnya dan relevansi pemahaman saling mempengaruhi antara elemen-elemen ini, menyoroti signifikansinya dalam mendorong kebijakan pertahanan yang kuat, terinformasi, dan berhasil.

Pemikiran strategis adalah pendekatan komprehensif dan jangka panjang yang memungkinkan pembuat kebijakan menetapkan tujuan, mengantisipasi ancaman, dan mengembangkan solusi yang

efektif (Schlaile & Urmetzer, 2019). Hal ini melibatkan penilaian kepentingan nasional, identifikasi potensi musuh, dan perumusan kebijakan proaktif untuk menjaga kepentingan tersebut. Pemikiran strategis lebih dari sekadar tindakan reaktif dan bantuan dalam memprediksi tantangan, memprioritaskan sumber daya, dan beradaptasi terhadap ancaman yang terus berkembang. Hal ini menekankan visi, perencanaan terpadu, dan pengambilan keputusan tepat waktu, yang semuanya penting dalam pembuatan kebijakan pertahanan.

Pendekatan berbasis bukti memastikan bahwa kebijakan pertahanan berakar pada data yang kuat, analisis obyektif, dan bukti empiris. Pemanfaatan informasi yang dapat diandalkan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai lingkungan keamanan, termasuk kemampuan militer, dinamika geopolitik, dan tren yang muncul (Baldino & Carr, 2016; Destradi *et al.*, 2021). Dengan memanfaatkan bukti, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang objektif dan dapat dibenarkan sehingga tidak rentan terhadap bias dan dugaan. Pendekatan berbasis bukti juga memberikan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi terhadap kebijakan pertahanan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun pemikiran strategis memberikan kerangka menyeluruh bagi pembuatan kebijakan pertahanan, pendekatan berbasis bukti memberikan landasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam kerangka tersebut. Interaksi antara keduanya sangat penting untuk menjamin kemanjuran dan keberhasilan kebijakan pertahanan. Pemikiran strategis memandu perumusan tujuan, sasaran, dan strategi keseluruhan,

sementara pendekatan berbasis bukti menginformasikan pengembangan taktik khusus, alokasi sumber daya, dan rencana implementasi.

Memahami keterkaitan antara pemikiran strategis dan pendekatan berbasis bukti sangatlah penting karena alasan berikut:

1. **Alokasi Sumber Daya yang Optimal:** Dengan mengintegrasikan pemikiran strategis dengan pendekatan berbasis bukti, pembuat kebijakan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Penyelarasan ini meminimalkan sumber daya yang terbuang sekaligus memaksimalkan potensi keberhasilan (Ananthapavan *et al.*, 2022).
2. **Mitigasi Risiko dan Ketidakpastian:** Interaksi ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi potensi ancaman, menilai kemungkinan terjadinya ancaman, dan merencanakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Dengan mendasarkan keputusan pada bukti, mereka dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan ketidakpastian dan meningkatkan keamanan nasional (Cairney, 2016).
3. **Perencanaan Jangka Panjang:** Perpaduan pemikiran strategis dan pendekatan berbasis bukti membantu pembuat kebijakan mengembangkan kebijakan pertahanan jangka panjang yang dapat beradaptasi terhadap dinamika perubahan (Halevy, 2016). Hal ini mendorong kesinambungan kebijakan dan memfasilitasi tinjauan strategis ke masa depan, memastikan kepentingan keamanan nasional terlindungi dalam jangka panjang.

4. Kepercayaan dan Legitimasi Publik: Kebijakan pertahanan yang terinformasi menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menunjukkan bahwa pilihan kebijakan didasarkan pada bukti yang dapat diandalkan dan pemikiran strategis, pembuat kebijakan dapat memperoleh kredibilitas dan legitimasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pakar pertahanan, dan mitra internasional (Schwartz, 2020).

Memahami keterkaitan antara pemikiran strategis dan pendekatan berbasis bukti sangat penting dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Penggabungan kedua elemen ini membawa pembuatan kebijakan ke tingkat yang lebih holistik, dimana tujuan jangka panjang, strategi proaktif, analisis yang akurat, dan pengambilan keputusan yang terinformasi menyatu. Dengan memahami dan memanfaatkan interaksi ini, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan pertahanan yang kuat, efisien, dan mudah beradaptasi yang secara efektif melindungi kepentingan nasional dan mendorong perdamaian dan keamanan dalam skala global.

Dalam lanskap global yang berubah dengan cepat saat ini, para pengambil keputusan dalam kebijakan pertahanan menghadapi tantangan besar dalam merumuskan strategi efektif untuk mengatasi berbagai ancaman. Persimpangan antara pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti telah menjadi hal yang penting dalam menjamin keamanan, stabilitas, dan kemakmuran suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan mengenai

interseksionalitas pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti.

Interseksionalitas antara pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti menghadirkan skenario yang kompleks bagi para pembuat kebijakan dan ahli strategi militer. Penting untuk mengkaji tantangan dan potensi hambatan yang menghambat integrasi efektif pemikiran strategis dengan bukti empiris dalam perumusan kebijakan pertahanan. Oleh karena itu, rumusan masalahnya berkisar pada pemahaman kekurangan yang ada saat ini dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti, menekankan peran interseksionalitas dalam mengatasi hambatan, dan menggaris-bawahi pentingnya bukti empiris dalam membentuk proses-proses ini. Oleh karena itu pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Apa saja elemen-elemen kunci pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan, dan bagaimana elemen-elemen tersebut saat ini diintegrasikan dengan bukti empiris?
2. Bagaimana interseksionalitas mempengaruhi efektivitas pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti?
3. Apa prinsip-prinsip dasar yang harus memandu integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan pertahanan?

Interseksionalitas pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti sangat penting untuk mengembangkan strategi efektif dalam

mengatasi ancaman kompleks yang dihadapi oleh negara. Dengan mengkaji bidang-bidang ini, para pembuat kebijakan, ahli strategi militer, dan peneliti dapat berupaya meningkatkan proses pengambilan keputusan dan memperkuat kebijakan pertahanan dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti.

MATERI DAN METODE

Metodologi penelitian kualitatif adalah pendekatan berharga yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data sekunder untuk mempelajari interseksionalitas pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti. Dengan memanfaatkan sumber data yang ada, metode ini memungkinkan dilakukannya penyelidikan komprehensif terhadap subjek sambil menyoroti implikasi teoritis dan praktis yang penting. Karya Creswell & Creswell (2017) akan menjadi panduan dalam memahami langkah-langkah penting yang terlibat dalam metodologi ini.

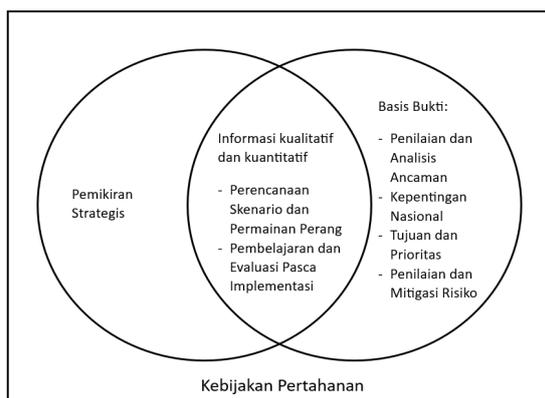
Analisis data sekunder melibatkan pemanfaatan kumpulan data, dokumen, materi audio visual, atau informasi yang dikumpulkan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini sangat cocok untuk mempelajari topik-topik yang memerlukan data dalam jumlah besar, yang diperluas dari waktu ke waktu dan dalam konteks yang berbeda. Dengan memeriksa materi yang sudah ada, peneliti dapat mengungkap wawasan baru, memvalidasi teori yang ada, atau mengisi kesenjangan pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elemen Kunci Pemikiran Strategis dalam Pembuatan Kebijakan Pertahanan dan Integrasinya dengan Bukti Empiris

Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan mencakup berbagai elemen kunci, seperti penilaian ancaman, alokasi sumber daya, pengembangan kemampuan, dan proses pengambilan keputusan. Salah satu lensa teoritis untuk menganalisis hal ini adalah melalui konsep “rasionalitas terbatas” yang dikemukakan oleh (Simon, 1957). Teori ini menyatakan bahwa pengambil keputusan sering kali beroperasi dalam keterbatasan kognitif, sehingga menghasilkan pilihan yang memuaskan dibandingkan mengoptimalkan pilihan. Dalam konteks pembuatan kebijakan pertahanan, memahami bagaimana pengambil keputusan mengatasi keterbatasan ini dapat menjelaskan integrasi pemikiran strategis dengan bukti empiris.

Integrasi bukti empiris ke dalam pembuatan kebijakan pertahanan melibatkan sintesis data dari berbagai sumber, termasuk laporan intelijen, analisis sejarah, dan penilaian para ahli. Teori neo-institusional, seperti yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (DiMaggio & Powell, 1983), menawarkan wawasan tentang bagaimana organisasi mengadopsi dan melembagakan praktik-praktik baru, termasuk pembuatan kebijakan berbasis bukti. Penerapan teori ini dapat membantu memahami hambatan kelembagaan dan fasilitator dalam mengintegrasikan bukti empiris ke dalam perumusan kebijakan pertahanan (lihat Gambar 2).



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Gambar 2. Diagram Venn Elemen Kunci Pemikiran Strategis dalam Pembuatan Kebijakan Pertahanan dan Integrasinya dengan Bukti Empiris

Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan mencakup elemen-elemen kunci sebagai berikut:

1. **Penilaian dan Analisis Ancaman:** Pembuatan kebijakan pertahanan yang efektif memerlukan penilaian dan analisis ancaman terhadap keamanan nasional yang akurat. Pemahaman komprehensif mengenai lingkungan keamanan yang berkembang, termasuk potensi musuh, konflik yang muncul, dan tantangan keamanan non-tradisional, sangatlah penting. Elemen ini melibatkan pemeriksaan bukti empiris untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan mengembangkan respons dan tindakan penanggulangan yang tepat (Settembre-Blundo et al., 2021).

Data empiris dari badan intelijen dan departemen pertahanan memberikan wawasan mengenai ancaman saat ini dan yang akan muncul. Misalnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerbitkan Penilaian Ancaman Dalam Negeri, yang mengidentifikasi

dan menganalisis berbagai ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk terorisme, serangan siber, dan bencana alam (Swalwell & Alagood, 2021).

Indeks Perdamaian Global (GPI) memberikan bukti empiris mengenai prevalensi dan dampak konflik dan kekerasan di seluruh dunia. Dengan menganalisis data GPI, pembuat kebijakan dapat menilai tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata dan ketidakstabilan di berbagai wilayah (Institute for Economics and Peace, 2021).

Salah satu aspek kunci dari penilaian dan analisis ancaman adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan memperkirakan ancaman di masa depan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika geopolitik, trend global, dan kemajuan teknologi yang dapat membentuk lanskap keamanan. Dengan menganalisis pola historis dan mempelajari peristiwa terkini, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi potensi ancaman sebelum ancaman tersebut benar-benar terwujud, sehingga memungkinkan diambilnya tindakan proaktif. Selain itu, proses ini melibatkan penilaian kemampuan dan niat musuh potensial, mempertimbangkan kemampuan militer, motivasi politik, dan tujuan strategis mereka.

2. **Kepentingan Nasional:** Pemikiran strategis menuntut pemahaman yang jelas tentang kepentingan nasional. Kebijakan pertahanan harus selaras dengan tujuan nasional yang menyeluruh, termasuk pemeliharaan integritas wilayah, perlindungan warga negara, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pemeliharaan aliansi dan kemitraan. Analisis berbasis bukti memberikan

wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan nasional, membantu pembuat kebijakan memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif (Ghiselli, 2018).

Analisis terhadap dokumen resmi pemerintah, seperti strategi keamanan nasional dan buku putih pertahanan, memberikan bukti empiris mengenai pernyataan kepentingan, tujuan, dan prioritas suatu negara dalam kebijakan pertahanan. Misalnya, *United Kingdom's Integrated Review* menguraikan tujuan dan prioritas strategisnya, termasuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan kesejahteraan, dan membentuk tatanan internasional (Government of the United Kingdom, 2021).

Jajak pendapat dan survei opini publik juga dapat memberikan wawasan empiris mengenai prioritas nasional dan persepsi publik terhadap ancaman keamanan. Misalnya, survei yang dilakukan oleh organisasi penelitian seperti *Pew Research Center* mengumpulkan data tentang sikap masyarakat terhadap belanja pertahanan, intervensi militer, dan ancaman terhadap keamanan nasional (Pew Research Center, 2020).

Selain itu, penilaian komprehensif terhadap kepentingan nasional juga harus mempertimbangkan pertimbangan geopolitik, seperti stabilitas regional dan perimbangan kekuatan. Memahami bagaimana tindakan negara lain dapat berdampak pada kepentingan kita sangatlah penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang efektif. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa kepentingan nasional

dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga memerlukan pendekatan perencanaan strategis yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Dengan terus mengevaluasi dan menilai kembali prioritas-prioritas kita, kita dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pertahanan kita tetap selaras dengan dinamika lanskap global yang selalu berubah. Pada akhirnya, pemahaman yang jelas mengenai kepentingan nasional akan menjadi landasan bagi kebijakan pertahanan yang kuat dan tangguh. Tanpa pemahaman komprehensif mengenai kepentingan nasional kita, kebijakan pertahanan mungkin salah arah atau tidak efektif dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang kita hadapi. Penting untuk terlibat dalam dialog rutin dengan para ahli, pemangku kepentingan, dan sekutu untuk mengumpulkan beragam perspektif dan wawasan yang dapat menjadi masukan bagi strategi pertahanan kita. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memastikan bahwa kebijakan pertahanan kita tidak hanya melindungi kepentingan nasional kita namun juga meningkatkan stabilitas dan keamanan dalam komunitas internasional.

3. Tujuan dan Prioritas: Pemikiran strategis mengharuskan penetapan tujuan pertahanan yang jelas dan dapat dicapai selaras dengan kepentingan nasional. Dengan melakukan analisis empiris terhadap skenario keamanan historis dan terkini, para pembuat kebijakan pertahanan dapat menetapkan prioritas yang tepat seperti meningkatkan kemampuan militer, membina kerja sama internasional, atau menjaga infrastruktur penting. Penetapan prioritas seperti ini membantu mengalokasikan sumber daya secara

efisien dan mencapai hasil yang diinginkan (Howard, 2018).

Lebih jauh lagi, menetapkan tujuan dan prioritas dalam perencanaan pertahanan memungkinkan dilakukannya pendekatan yang lebih fokus dan terkoordinasi dalam mengatasi tantangan keamanan. Hal ini memungkinkan para pembuat kebijakan pertahanan untuk mengidentifikasi ancaman yang paling mendesak dan mengembangkan strategi untuk melawannya secara efektif. Selain itu, tujuan yang jelas memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi keberhasilan inisiatif pertahanan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan menyelaraskan tujuan pertahanan dengan kepentingan nasional, para pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan bahwa sektor pertahanan berkontribusi terhadap tujuan nasional yang lebih luas.

4. **Penilaian dan Mitigasi Risiko:** Evaluasi yang cermat terhadap risiko dan potensi konsekuensinya sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Dengan mempertimbangkan bukti empiris dan melakukan penilaian risiko, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kerentanan dan merancang strategi mitigasi risiko yang sesuai. Elemen ini mencakup pemahaman kemampuan dan niat musuh, menilai potensi konsekuensi dari berbagai tindakan militer, dan mengantisipasi dampaknya terhadap sekutu, sambil mempertimbangkan bukti empiris (Settembre-Blundo et al., 2021).

Data empiris mengenai peristiwa dan trend sejarah dapat memberikan

masukan bagi penilaian risiko dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Misalnya, penelitian yang menganalisis konflik militer dan krisis keamanan di masa lalu memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap eskalasi dan deeskalasi. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan politik seperti Barbara F. Walter dan Paul K. Huth mengkaji pola permulaan dan durasi konflik, membantu pembuat kebijakan menilai kemungkinan konflik di masa depan (Walter & Huth, 2020).

Metodologi penilaian risiko kuantitatif, seperti analisis risiko probabilistik, menggunakan data empiris untuk mengevaluasi kemungkinan dan potensi dampak dari berbagai ancaman dan kerentanan keamanan. Pendekatan-pendekatan ini membantu memprioritaskan upaya mitigasi risiko dan alokasi sumber daya dalam kebijakan pertahanan (Kaplan & Garrick, 1981).

Selain itu, mitigasi risiko yang efektif melibatkan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak potensi risiko. Hal ini dapat mencakup penerapan protokol keamanan, pengembangan rencana darurat, dan investasi pada teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah potensi ancaman. Dengan mengambil langkah proaktif untuk memitigasi risiko, pembuat kebijakan dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan negara atau organisasi mereka secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan komprehensif terhadap mitigasi risiko juga melibatkan pengembangan kerja sama dan kolaborasi internasional. Hal ini dapat mencakup berbagi intelijen,

mengoordinasikan respons terhadap potensi ancaman, dan membuat perjanjian pertahanan bersama. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat memperkuat kemampuan kolektif mereka untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang muncul secara tepat waktu dan efektif (A. Sarjito, 2023a).

Integrasi pemikiran strategis dengan bukti empiris mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data: Integrasi bukti empiris dalam pembuatan kebijakan pertahanan memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari tren historis, laporan intelijen, dan penelitian ilmiah, pembuat kebijakan dapat mencapai penilaian ancaman yang lebih obyektif, mengidentifikasi pola, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Integrasi ini memungkinkan perencanaan berbasis bukti dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pertahanan (Troisi et al., 2020).

Dengan memasukkan bukti ke dalam pembuatan kebijakan pertahanan, para pengambil keputusan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai lanskap keamanan saat ini. Menganalisis data dan laporan intelijen membantu mengidentifikasi ancaman yang muncul, mengantisipasi potensi tantangan, dan menilai efektivitas strategi pertahanan yang ada. Peningkatan kesadaran situasional ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, beradaptasi dengan keadaan yang terus berkembang, dan tetap

waspada terhadap potensi risiko atau musuh (A. Sarjito, 2023b).

2. Perencanaan Skenario dan Permainan Perang: Bukti empiris memainkan peranan penting dalam perencanaan skenario dan latihan perang, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan pertahanan untuk menguji berbagai tindakan. Dengan menganalisis konflik-konflik sebelumnya, mempelajari ancaman-ancaman yang muncul, dan melakukan simulasi skenario-skenario potensial, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi potensi risiko, menilai pilihan-pilihan respons, dan menguji kelayakan strategi pertahanan nasional (Fujiwara et al., 2023). Bukti empiris memandu pengambilan keputusan, membantu mengoptimalkan sumber daya, dan beradaptasi dengan tantangan keamanan yang terus berkembang.

Selain itu, bukti empiris memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pembuat kebijakan mengenai kemampuan dan kerentanan kekuatan militer mereka sendiri serta kekuatan musuh potensial. Pengetahuan ini memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif dan alokasi sumber daya dengan cara yang memaksimalkan keamanan nasional. Selain itu, bukti empiris membantu pembuat kebijakan mengantisipasi dan memitigasi potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan mereka, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab (I. A. Sarjito et al., 2023). Dalam lanskap keamanan global yang terus berubah, penggunaan bukti empiris dalam permainan perang sangat penting untuk memastikan

perlindungan dan kesejahteraan suatu negara dan warganya.

4. Pembelajaran dan Evaluasi Pasca Implementasi: Evaluasi pasca implementasi yang empiris dan berdasarkan bukti membantu para pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan pertahanan. Dengan menganalisis data empiris, termasuk laporan intelijen, angka korban, dan dampak ekonomi, pembuat kebijakan dapat mengukur keberhasilan dan kelemahan strategi yang diterapkan. Hal ini memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman masa lalu, menyesuaikan kebijakan, dan meningkatkan pengambilan keputusan di masa depan.

Pembelajaran yang didapat melalui evaluasi pasca implementasi sangatlah penting dalam membentuk kebijakan pertahanan di masa depan. Dengan memahami efektivitas dan kekurangan strategi yang diterapkan, pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat dan menyesuaikan taktik mereka untuk menjamin keselamatan dan keamanan warga negara. Proses evaluasi dan penyesuaian yang berulang-ulang ini membantu dalam terus meningkatkan kebijakan pertahanan dan tetap berada di depan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang (Ruivo et al., 2014). Pada akhirnya, melalui analisis empiris dan evaluasi berbasis bukti, para pembuat kebijakan dapat secara efektif melindungi warga negaranya dan menjaga keamanan nasional.

Elemen Kunci Pemikiran Strategis dalam Pembuatan Kebijakan Pertahanan dan Integrasinya dengan Bukti Empiris,

Dihubungkan dengan Penelitian Sebelumnya

Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan melibatkan faktor-faktor yang saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi untuk menjaga kepentingan keamanan nasional. Hal ini memerlukan tinjauan ke masa depan, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap dinamika internal dan eksternal. Bukti empiris merupakan landasan penting bagi pemikiran strategis yang efektif, yang memberikan para pembuat kebijakan data dan wawasan nyata untuk pengambilan keputusan yang tepat. Diskusi ini mengeksplorasi elemen-elemen kunci pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan dan integrasi bukti-bukti empiris, dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya untuk menjelaskan signifikansinya sebagai berikut:

1. Memahami Bentang Alam Ancaman: Pemikiran strategis dimulai dengan pemahaman komprehensif terhadap ancaman yang ada dan yang akan muncul. Penelitian (Lee et al., 2021) menyoroti pentingnya penilaian lanskap geopolitik secara terus-menerus, mengidentifikasi potensi musuh, dan menganalisis kemampuan serta niat mereka. Bukti empiris, seperti laporan intelijen dan penilaian ancaman, membantu memetakan lingkungan ancaman yang terus berkembang, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan untuk memprioritaskan sumber daya pertahanan secara efektif.
2. Penilaian Kepentingan Nasional: Mendefinisikan dan memprioritaskan kepentingan nasional merupakan hal mendasar dalam pemikiran strategis

- dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Seperti yang dikemukakan oleh (Nuechterlein, 1976), bukti empiris membantu menggambarkan pentingnya ekonomi, politik, dan keamanan yang membentuk tujuan strategis suatu negara. Melalui analisis empiris, para pembuat kebijakan dapat mengukur potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan berbagai tindakan, menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan tujuan nasional secara menyeluruh.
3. Alokasi Sumber Daya dan Perencanaan Kekuatan: Alokasi sumber daya dan perencanaan kekuatan yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan kemampuan pertahanan. Penelitian (J. Wang et al., 2018) menekankan pentingnya bukti empiris dalam menentukan efektivitas dan efektivitas biaya aset militer. Dengan menganalisis data historis dan melakukan simulasi, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi bidang-bidang investasi, menyederhanakan proses pengadaan, dan meningkatkan kesiapan operasional secara keseluruhan.
 4. Penilaian Risiko dan Perencanaan Kontinjensi: Pemikiran strategis melibatkan antisipasi dan mitigasi potensi risiko melalui perencanaan kontinjensi yang kuat. Menurut (Smithson, 2017), bukti empiris memungkinkan pembuat kebijakan mengevaluasi kemungkinan dan dampak berbagai skenario keamanan, mulai dari konflik konvensional hingga ancaman asimetris. Dengan memanfaatkan preseden historis dan analisis kuantitatif, pengambil keputusan dapat mengembangkan strategi respons yang fleksibel dan beradaptasi terhadap ancaman dan ketidakpastian yang terus berkembang.
 5. Keterlibatan dan Aliansi Diplomatik: Kebijakan pertahanan yang efektif memerlukan keterlibatan diplomatik dan kolaborasi dengan sekutu dan mitra internasional. Penelitian (Michalski, 2019) menggarisbawahi pentingnya bukti empiris dalam menilai kapabilitas dan keandalan mitra strategis. Dengan memanfaatkan data empiris mengenai dinamika aliansi dan komitmen pertahanan kolektif, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kerangka kerja kolaboratif yang meningkatkan kemampuan pencegahan dan mendorong stabilitas regional.
 6. Integrasi Bukti Empiris: Mengintegrasikan bukti empiris ke dalam pemikiran strategis melibatkan pendekatan sistematis dalam pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Hal ini memerlukan pendekatan multidisiplin yang memanfaatkan wawasan dari ilmu politik, ekonomi, sejarah militer, dan bidang terkait lainnya. Dengan memadukan temuan-temuan empiris dengan penilaian kualitatif dan penilaian para ahli, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan pertahanan yang kuat yang didasarkan pada realitas empiris sambil mempertimbangkan ketidakpastian strategis dan perubahan geopolitik yang dinamis (Franco et al., 2014).
- Kesimpulannya, pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan bergantung pada pengintegrasian bukti empiris untuk memberikan informasi pada proses pengambilan keputusan. Para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi pertahanan yang proaktif dan adaptif dengan memahami lanskap ancaman, menilai kepentingan nasional, mengalokasikan sumber daya secara efektif,

melakukan penilaian risiko, dan mendorong keterlibatan diplomatik. Dengan memanfaatkan penelitian dan wawasan empiris sebelumnya, para pembuat kebijakan dapat menghadapi tantangan keamanan yang kompleks dengan percaya diri, menjaga kepentingan nasional dan mendorong stabilitas global.

Dampak Interseksionalitas terhadap Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti

Interseksionalitas adalah sebuah konsep yang mengakui bahwa identitas sosio-kultural seseorang dan hak-hak istimewa atau kekurangannya saling bersinggungan dan berinteraksi, sehingga menghasilkan pengalaman dan perspektif yang unik.

Teori interseksionalitas, yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (Crenshaw, 2013), menekankan bagaimana perpotongan identitas sosial (seperti ras, gender, kelas) dapat membentuk pengalaman kekuasaan dan penindasan. Diterapkan pada pembuatan kebijakan pertahanan, interseksionalitas menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti gender, etnis, dan status sosial-ekonomi mempengaruhi perspektif pembuat kebijakan dan hasil keputusan strategis. Menganalisis kebijakan pertahanan melalui lensa titik-temu dapat mengungkap bias-bias yang terabaikan dan meningkatkan efektivitas pemikiran strategis.

Interseksionalitas memainkan peranan penting dalam membentuk efektivitas pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti (Lösing et al., n.d.). Prinsip ini mengakui bahwa setiap individu memiliki banyak identitas yang tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan sebagai identitas yang saling berhu-

bugan dan saling bergantung. Memahami bagaimana identitas-identitas yang saling bersinggungan ini berinteraksi dan bersinggungan sangat penting untuk mengembangkan kebijakan pertahanan yang komprehensif dan inklusif yang menjawab beragam kebutuhan dan pengalaman individu dalam masyarakat.

Selain itu, interseksionalitas membantu menjelaskan dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan adanya pendekatan yang lebih bernuansa dan terinformasi dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Dengan mengkaji bagaimana berbagai identitas saling bersinggungan, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi dan mengatasi dengan lebih baik tantangan dan kerentanan unik yang dihadapi oleh komunitas yang terpinggirkan, seperti perempuan, kelompok ras dan etnis minoritas, serta komunitas LGBTQ+, dalam konteks pertahanan.

Pemahaman ini dapat mengarah pada penerapan kebijakan dan inisiatif yang ditargetkan yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan sistemik dan memastikan akses yang setara terhadap peluang di sektor pertahanan. Tanpa mempertimbangkan interseksionalitas, kebijakan pertahanan berisiko melanggengkan diskriminasi dan semakin meminggirkan kelompok yang kurang beruntung, sehingga menghambat kemajuan menuju masyarakat yang benar-benar inklusif dan adil sebagai berikut:

1. Memperluas Perspektif: Interseksionalitas menggarisbawahi pentingnya merangkul sudut pandang dan pengalaman yang beragam. Pemikiran strategis sangat bergantung pada pertimbangan perspektif alternatif

untuk mengembangkan kebijakan yang efisien. Dengan mengintegrasikan pemikiran interseksional ke dalam pembuatan kebijakan pertahanan, para pengambil keputusan dapat mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai tantangan kompleks yang dihadapi oleh berbagai kelompok. Hal ini mendorong solusi pertahanan yang lebih inklusif dan efektif yang mengatasi berbagai faktor yang saling bersinggungan seperti ras, gender, dan status sosial-ekonomi (Moneta, 2017).

Studi empiris, seperti yang dilakukan oleh *Pew Research Center*, menunjukkan bahwa mempertimbangkan persilangan identitas akan memperluas perspektif dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Misalnya, penelitian Pew mengenai sikap publik terhadap isu-isu pertahanan mengungkapkan bahwa individu dari kelompok demografi berbeda mungkin memprioritaskan ancaman keamanan secara berbeda berdasarkan identitas mereka yang saling bersinggungan, seperti ras, gender, dan status sosial ekonomi (Pew Research Center, 2020).

Penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Security Sector Management* menunjukkan bahwa menggabungkan beragam perspektif berdasarkan identitas yang saling bersilangan akan meningkatkan pemikiran strategis dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang keamanan (Aning & Anaba, 2016).

Selain mendorong inklusivitas, merangkul beragam sudut pandang dan pengalaman juga meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Ketika peng-

ambil keputusan terbuka terhadap perspektif yang berbeda, mereka akan lebih mungkin mengidentifikasi solusi dan pendekatan unik terhadap tantangan yang kompleks. Dengan menggabungkan pemikiran interseksional, kebijakan pertahanan dapat menjadi lebih mudah beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat yang beragam. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa solusi pertahanan efektif namun juga menumbuhkan rasa percaya dan legitimasi di antara berbagai komunitas. Selain itu, mempertimbangkan faktor-faktor yang saling bersinggungan seperti ras, gender, dan status sosial-ekonomi akan membantu mengatasi kesenjangan sistemik dan mendorong keadilan sosial dalam lembaga-lembaga pertahanan.

2. Menantang Bias dan Stereotip: Interseksionalitas menantang cara berpikir tradisional dengan mengungkap dan membongkar bias dan stereotip yang mungkin meresap dalam proses pembuatan kebijakan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana berbagai lapisan identitas berinteraksi mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertanyakan asumsi dan prasangka mereka. Hal ini mengarah pada perumusan kebijakan pertahanan berdasarkan bukti dan bukan prasangka, sehingga menghasilkan strategi yang lebih tepat dan efektif (Slim, 2018).

Data empiris mengenai bias dan stereotip yang tersirat dalam lembaga-lembaga pertahanan menyoroti pentingnya interseksionalitas dalam menantang bias. Misalnya, penelitian yang menggunakan tes asosiasi implisit (IAT) telah menemukan bukti adanya

bias implisit terkait ras, gender, dan identitas sosial lainnya di kalangan personel militer dan pembuat kebijakan pertahanan (Nosek et al., 2002).

Penelitian yang diterbitkan dalam *Military Psychology* menunjukkan bahwa interseksionalitas berfungsi sebagai kerangka kerja yang berharga untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias dan stereotip dalam pembuatan kebijakan pertahanan, sehingga mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih adil dan inklusif (Burton, 2014).

Selain itu, menerapkan interseksionalitas dalam pembuatan kebijakan juga membantu mengatasi kesenjangan sistemik yang dihadapi kelompok marginal tertentu. Dengan mengenali sifat berbagai bentuk diskriminasi yang saling tumpang tindih dan saling berhubungan, para pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan yang menargetkan akar penyebab kesenjangan ini. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi pertahanan tidak hanya melindungi keamanan nasional namun juga memajukan keadilan dan kesetaraan sosial. Dengan menantang bias dan stereotip, interseksionalitas berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

3. Peningkatan Relevansi Kebijakan: Dengan memasukkan interseksionalitas, pembuatan kebijakan pertahanan dapat memastikan bahwa strategi dan praktik benar-benar menjawab kebutuhan dan kekhawatiran beragam populasi. Pendekatan ini memfasilitasi pengembangan kebijakan berbasis bukti yang mengakui keragaman dan tumpang tindih kerentanan yang dihadapi oleh individu dengan identitas

yang saling bersinggungan. Kebijakan yang dibangun berdasarkan sudut pandang interseksional mempunyai potensi untuk mengurangi kesenjangan, menanggapi tantangan keamanan yang kompleks, dan mendorong keadilan sosial (Cameron & Tedds, 2023).

Bukti empiris menunjukkan bahwa mempertimbangkan persilangan identitas akan meningkatkan relevansi kebijakan pertahanan terhadap beragam populasi. Misalnya saja, penelitian-penelitian yang menganalisis dampak kebijakan pertahanan terhadap komunitas-komunitas yang terpinggirkan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan interseksionalitas dapat secara tidak sengaja melanggengkan kesenjangan dan ketidaksetaraan (Hancock, 2007).

Penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Defense Studies and Resource Management* menunjukkan bahwa memasukkan interseksionalitas ke dalam pembuatan kebijakan pertahanan akan meningkatkan relevansi kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan menjawab kebutuhan dan pengalaman unik semua individu, terlepas dari identitas mereka yang saling bersinggungan (Henry, 2017).

Lebih jauh lagi, pendekatan interseksional dalam pembuatan kebijakan pertahanan mengakui sifat saling berhubungan dari berbagai kategori sosial seperti ras, gender, kelas, dan seksualitas. Hal ini mengakui bahwa setiap individu mengalami berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi secara bersamaan, dan bahwa identitas yang saling bersinggungan ini

membentuk pengalaman dan kerentanan mereka. Dengan mempertimbangkan dimensi keamanan dan pertahanan yang saling bersinggungan, para pembuat kebijakan dapat lebih memahami tantangan-tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas-komunitas yang terpinggirkan dan merancang strategi-strategi yang secara efektif menjawab kebutuhan mereka. Pendekatan holistik ini tidak hanya mendorong inklusivitas dan kesetaraan namun juga meningkatkan efektivitas dan dampak kebijakan pertahanan secara keseluruhan.

4. Mengatasi Masalah Sistemik: Pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti seringkali mengabaikan isu-isu sistemik yang berakar pada kesenjangan yang bersifat interseksional (Jaiswal & Mumba, 2022). Mengintegrasikan interseksionalitas mengubah analisis kebijakan dari fokus identitas tunggal yang sederhana menjadi pendekatan komprehensif yang mengatasi permasalahan sistemik. Pendekatan seperti ini mengakui bahwa tantangan-tantangan sistem memerlukan solusi-solusi multi-dimensi yang mempertimbangkan identitas-identitas yang saling bersinggungan, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih disesuaikan untuk mengatasi akar permasalahan konflik, ketidakamanan, dan tantangan pertahanan.

Data empiris mengenai kesenjangan sistemik dalam lembaga-lembaga pertahanan menggarisbawahi pentingnya interseksionalitas dalam mengatasi masalah-masalah sistemik. Misalnya, laporan dari organisasi seperti *Defense Advisory Committee on Women in the Services* (DACOWITS) memberikan

bukti empiris mengenai hambatan sistemik yang dihadapi perempuan dan minoritas di militer, termasuk isu terkait perekrutan, retensi, dan peningkatan karier (DACOWITS, 2020). Penelitian yang diterbitkan dalam *Dialog Keamanan* menunjukkan bahwa pendekatan titik-temu dalam pembuatan kebijakan pertahanan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab permasalahan sistemik, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Smith & Stavrevska, 2022).

Dengan mengenali dan mengatasi kesenjangan interseksional, pembuat kebijakan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kompleks yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan pendekatan pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, karena pendekatan ini mempertimbangkan pengalaman unik dan kebutuhan individu yang terpinggirkan oleh berbagai identitas yang saling bersinggungan. Selain itu, mengintegrasikan interseksionalitas ke dalam analisis kebijakan dapat membantu mengungkap struktur kekuasaan tersembunyi dan kesenjangan yang melanggengkan permasalahan sistemik. Dengan mengkaji bagaimana berbagai bentuk diskriminasi saling bersinggungan dan memperparah satu sama lain, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab mendasar dari kesenjangan ini dan berupaya untuk menghilangkannya.

5. Memastikan Keterwakilan yang Setara: Interseksionalitas menyoroti pentingnya keterwakilan dan partisipasi yang setara dalam proses pembuatan kebijakan pertahanan. Dengan mengintegrasikan berbagai suara, pengalaman, dan keahlian, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan pertahanan dan solusi potensial akan muncul. Hal ini mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti, karena beragam perspektif dapat memperkaya analisis, evaluasi, dan pemilihan data dan bukti yang relevan (Costino, 2018).

Studi empiris mengenai keterwakilan dalam lembaga-lembaga pertahanan menyoroti pentingnya interseksionalitas dalam memastikan keterwakilan yang setara. Misalnya, data dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) A.S. menunjukkan kesenjangan keterwakilan berdasarkan identitas yang saling bersinggungan, seperti ras dan gender, dalam posisi kepemimpinan di lembaga militer dan pertahanan (GAO, 2020).

Penelitian yang dipublikasikan di *Armed Forces & Society* menunjukkan bahwa mengatasi hambatan-hambatan yang saling bersinggungan dalam hal keterwakilan sangatlah penting untuk menciptakan lembaga-lembaga pertahanan yang lebih inklusif dan beragam, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan pertahanan (Rohall et al., 2017).

Selain itu, keterwakilan yang setara juga membantu mengatasi bias dan kesenjangan sistemik yang mungkin ada dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran kelompok marginal diperhitungkan, dan bahwa kebijakan dirancang agar inklusif dan

adil. Dengan secara aktif berupaya menghilangkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi, seperti diskriminasi dan eksklusi, interseksionalitas dapat membantu menciptakan proses pembuatan kebijakan pertahanan yang lebih inklusif dan efektif. Hal ini tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, namun juga memperkuat efektivitas dan legitimasi kebijakan pertahanan secara keseluruhan.

Dampak Interseksionalitas terhadap Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti, Dihubungkan dengan Penelitian Sebelumnya

Interseksionalitas, sebuah konsep yang berasal dari teori feminis, mengakui sifat saling berhubungan dari identitas dan pengalaman sosial, seperti ras, gender, kelas, dan seksualitas. Dalam bidang pembuatan kebijakan pertahanan, memahami dampak interseksionalitas sangatlah penting untuk menyusun strategi yang inklusif dan efektif dalam mengatasi beragam kebutuhan dan kerentanan masyarakat. Diskusi ini mengeksplorasi bagaimana interseksionalitas mempengaruhi pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti, dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya untuk menjelaskan signifikansinya sebagai berikut:

1. Mengenal Beragam Perspektif: Interseksionalitas mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan keterkaitan identitas dan pengalaman individu dan komunitas yang terkena dampak kebijakan pertahanan. Penelitian yang dilakukan oleh (Crenshaw, 2013) menekankan pentingnya menge-

- nali bagaimana faktor-faktor seperti ras, gender, dan status sosial ekonomi saling bersinggungan dalam membentuk pengalaman individu mengenai keamanan dan kerentanan. Dengan memasukkan beragam perspektif ke dalam pemikiran strategis, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi titik-titik buta, menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, dan memastikan bahwa kebijakan pertahanan selaras dengan banyak pemangku kepentingan.
2. Mengatasi Ketimpangan Struktural: Interseksionalitas menyoroti kesenjangan struktural yang mendasari tantangan keamanan dan prioritas kebijakan pertahanan. Menurut Davis (2016), sistem penindasan dan diskriminasi yang saling bersinggungan sering kali menimbulkan beban ketidakamanan yang tidak proporsional pada komunitas yang terpinggirkan. Bukti empiris menyoroti perbedaan dampak kebijakan pertahanan terhadap berbagai kelompok demografis, menggarisbawahi perlunya intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan sistemik dan mendorong kohesi sosial.
 3. Meningkatkan Penilaian Ancaman: Interseksionalitas memberi informasi pada penilaian ancaman yang lebih bernuansa dengan menyoroti dimensi interseksional dari risiko keamanan. Penelitian yang dilakukan oleh (Collins, 2015) menunjukkan bahwa kerangka keamanan tradisional sering kali mengabaikan kerentanan unik yang dihadapi oleh komunitas marginal, seperti perempuan, individu LGBTQ+, dan etnis minoritas. Dengan mengintegrasikan analisis titik-temu ke dalam penilaian ancaman, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman yang muncul yang secara tidak proporsional berdampak pada kelompok-kelompok marginal dan mengembangkan respons-respons yang disesuaikan dengan prioritas perlindungan hak-hak dan keselamatan seluruh warga negara.
 4. Mempromosikan Solusi Kebijakan Inklusif: Interseksionalitas memberikan masukan bagi pengembangan solusi kebijakan inklusif yang menjawab kebutuhan beragam populasi. Studi oleh Tan et al. (2023) menunjukkan bagaimana pendekatan titik-temu dalam pembuatan kebijakan pertahanan dapat menumbuhkan kohesi dan ketahanan sosial yang lebih besar dengan mengatasi akar penyebab ketidakamanan dan konflik. Dengan melibatkan suara-suara yang terpinggirkan dalam pembahasan kebijakan dan proses pengambilan keputusan, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi pertahanan yang lebih holistik dan berkelanjutan yang mendorong kesetaraan, keadilan, dan perdamaian.
 5. Mengintegrasikan Bukti Empiris: Interseksionalitas meningkatkan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti dengan memperluas cakupan analisis empiris untuk mencakup identitas dan pengalaman yang saling bersinggungan. Penelitian (Bagilhole, 2010) menggarisbawahi pentingnya pengumpulan data terpilah mengenai karakteristik demografi, seperti ras, gender, dan status sosial ekonomi, untuk dijadikan masukan dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan. Dengan memanfaatkan bukti empiris titik-temu, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kesenjangan,

memantau kemajuan, dan menilai efektivitas intervensi pertahanan dalam mengatasi beragam kebutuhan keamanan.

Kesimpulannya, interseksionalitas sangat mempengaruhi pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti dengan mengedepankan keterkaitan identitas dan pengalaman individu dan komunitas yang terkena dampak tantangan keamanan. Dengan mengenali beragam perspektif, mengatasi kesenjangan struktural, meningkatkan penilaian ancaman, mendorong solusi kebijakan inklusif, dan mengintegrasikan bukti empiris, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi pertahanan yang lebih responsif, adil, dan efektif. Dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya dan wawasan titik-temu, para pembuat kebijakan pertahanan dapat menavigasi lanskap keamanan yang kompleks dengan kepekaan dan pandangan ke depan, yang pada akhirnya memajukan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan keamanan manusia.

Integrasi Pemikiran Strategis dan Bukti Empiris dalam Perumusan Kebijakan Pertahanan

Dalam lanskap keamanan global yang terus berubah, perumusan kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam membentuk postur keamanan suatu negara dan menjaga kepentingannya. Mengintegrasikan pemikiran strategis dan bukti empiris memastikan bahwa kebijakan pertahanan terinformasi dengan baik, efektif, dan dapat disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Diskusi ini mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang harus memandu integrasi pemikiran strategis dan bukti

empiris dalam perumusan kebijakan pertahanan (Andersen et al., 2022).

Memandu integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan pertahanan memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip tersebut adalah transparansi, yang memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan bukti yang dipertimbangkan dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Christensen et al., 2019). Selain itu, komitmen terhadap evaluasi dan adaptasi yang berkelanjutan, yang diambil dari prinsip-prinsip pengelolaan adaptif (Holling & Walters, 1978), dapat meningkatkan kelincahan dan efektivitas pembuatan kebijakan pertahanan dalam menanggapi ancaman dan bukti yang terus berkembang sebagai berikut:

1. **Pemikiran Strategis: Visi Jangka Panjang:** Pemikiran strategis memerlukan perspektif yang komprehensif dan berwawasan ke depan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman keamanan nasional, mengantisipasi tantangan yang muncul, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Visi strategis memungkinkan para pembuat kebijakan pertahanan untuk merumuskan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai, kepentingan, dan tujuan strategis negara (Dionisio, 2017).
2. **Pendekatan Holistik:** Pemikiran strategis melibatkan analisis keterkaitan berbagai dimensi keamanan, seperti faktor militer, politik, diplomatik, ekonomi, dan teknologi. Pendekatan holistik sangat diperlukan karena pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pertahanan mempertimbangkan aspek multidimensi keamanan dan memperhitungkan potensi

- interaksi dan dampak riak (Wagner Mainardes *et al.*, 2014).
3. **Prioritas: Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris** memerlukan prioritas yang jelas dalam perumusan kebijakan pertahanan. Hal ini mencakup identifikasi ancaman yang paling mendesak, pengalokasian sumber daya secara efektif, dan penanganan kerentanan yang dapat membahayakan keamanan nasional. Memprioritaskan tujuan strategis memungkinkan pemerintah memfokuskan upaya dan sumber daya untuk mengatasi tantangan yang paling penting (Boesso *et al.*, 2015).
 4. **Bukti Empiris: Analisis Ketat: Bukti empiris** memberikan dasar faktual bagi pengambilan keputusan kebijakan pertahanan. Hal ini melibatkan pelaksanaan penelitian menyeluruh, analisis data historis dan kontemporer, serta penggunaan metodologi kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan wawasan mengenai tantangan keamanan. Analisis yang cermat memastikan bahwa kebijakan pertahanan didasarkan pada informasi yang akurat dan penilaian yang matang mengenai risiko dan peluang (Grant, 2021).
 5. **Penilaian yang Realistis: Mengintegrasikan bukti empiris** dalam perumusan kebijakan pertahanan memerlukan penilaian yang realistis terhadap kemampuan, keterbatasan, dan hasil potensial. Dengan memahami ruang lingkup dan keterbatasan kapasitas militer, ekonomi, dan diplomatik mereka, para pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak melebih-lebihkan atau meremehkan kemampuan mereka atau kemampuan musuh potensial (Dionisio, 2017).
 6. **Manajemen Risiko: Bukti empiris** memungkinkan pembuat kebijakan pertahanan mengelola risiko secara efektif dengan menilai potensi konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan. Hal ini mencakup evaluasi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan, potensi biaya dan manfaat, konsekuensi yang tidak diinginkan, dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Manajemen risiko berbasis bukti berkontribusi terhadap alokasi sumber daya yang lebih efektif dan bijaksana (Giannakis & Papadopoulos, 2016).
- Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. **Proses Iteratif: Mengintegrasikan pemikiran strategis dan bukti empiris** dalam perumusan kebijakan pertahanan memerlukan proses berulang dimana teori dan asumsi dari pemikiran strategis saling mempengaruhi dengan data dan analisis empiris (Bolisani & Bratianu, 2017). Proses ini memastikan bahwa tujuan strategis dan pilihan kebijakan terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan bukti baru, ancaman yang muncul, dan dinamika geopolitik yang berubah.
 2. **Keterlibatan Berbagai Pemangku Kepentingan: Untuk mencapai integrasi menyeluruh** antara pemikiran strategis dan bukti empiris, penting untuk melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti pakar pertahanan, akademisi, badan intelijen, dan personel militer. Pendekatan inklusif ini membantu mengumpulkan pengetahuan, keahlian, dan perspektif untuk membuat pilihan kebijakan yang menyeluruh dan terinformasi (Elias, 2022).

3. Kemampuan Beradaptasi: Kebijakan pertahanan harus dapat beradaptasi terhadap perubahan keadaan. Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris memungkinkan pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan, melakukan penyesuaian yang diperlukan, dan merespons tantangan yang muncul secara proaktif. Evaluasi rutin dan putaran umpan balik memastikan bahwa kebijakan pertahanan tetap relevan dan selaras dengan lanskap keamanan yang terus berkembang (Parthasarthy & Sethi, 2018).

Integrasi Pemikiran Strategis dan Bukti Empiris dalam Perumusan Kebijakan Pertahanan, Dihubungkan dengan Penelitian Sebelumnya

Perumusan kebijakan pertahanan yang efektif menuntut integrasi yang seimbang antara pemikiran strategis dan bukti empiris. Pemikiran strategis melibatkan pandangan ke masa depan, analisis, dan pembuatan keputusan yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap tantangan keamanan dan kepentingan nasional. Bukti empiris memberikan data dan wawasan yang diperlukan untuk pembuatan keputusan yang terinformasikan. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan pertahanan, yang dapat ditarik dari penelitian sebelumnya untuk menggambarkan signifikansinya sebagai berikut:

1. Pemikiran Strategis sebagai Landasan: Pemikiran strategis berfungsi sebagai landasan perumusan kebijakan pertahanan, yang menuntun para pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi sasaran, menilai ancaman, dan merancang strategi untuk melindungi kepentingan

keamanan nasional. Penelitian oleh Hutchings & Treverton (2022) menekankan peran pandangan ke depan strategis dalam mengantisipasi tantangan dan peluang masa depan, yang memungkinkan respons kebijakan proaktif. Pemikiran strategis melibatkan perencanaan skenario, penilaian risiko, dan pertimbangan trend geopolitik untuk mengembangkan strategi pertahanan yang adaptif terhadap lingkungan yang berubah.

2. Bukti Empiris untuk Pembuatan Keputusan yang Terinformasi: Bukti empiris melengkapi pemikiran strategis dengan memberikan data faktual dan analisis untuk mendukung keputusan kebijakan. Menurut George & Stern (2002), bukti empiris mencakup berbagai sumber, yang meliputi laporan intelijen, data historis, dan analisis kuantitatif. Dengan melandaskan keputusan kebijakan pada realitas empiris, para pembuat kebijakan dapat memitigasi bias kognitif, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pertahanan. Bukti empiris menginformasikan penilaian ancaman, alokasi sumber daya, dan penilaian kinerja, yang memungkinkan perumusan kebijakan berbasis bukti.
3. Pemahaman Dinamika Keamanan yang Kompleks: Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris memungkinkan para pembuat kebijakan untuk memahami kompleksitas dinamika keamanan secara komprehensif. Menurut Al-Abbadi et al. (2024), lingkungan keamanan berwajah ganda, yang mencakup ancaman militer tradisional, aktor-aktor non-negara, perang siber, dan tantangan transnasional. Pemikiran

strategis membantu mengidentifikasi sasaran strategis secara menyeluruh, sementara bukti empiris memberikan wawasan terhadap ancaman dan kerawanan tertentu. Dengan mensintesis wawasan strategis dan analisis empiris, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi pertahanan secara holistik yang menunjukkan spektrum tantangan keamanan secara luas.

4. Respons Kebijakan yang Adaptif: Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris memfasilitasi respons kebijakan yang adaptif terhadap ancaman keamanan yang berkembang. Penelitian oleh Eriksson & Weber (2008) menekankan pentingnya kelenturan dan kegesitan dalam perumusan kebijakan pertahanan. Dengan memantau secara terus-menerus indikator-indikator empiris dan menilai kembali asumsi-asumsi strategis, para pembuat kebijakan dapat menyesuaikan kebijakan dari waktu ke waktu untuk menangkal ancaman-ancaman yang timbul dan mengeksplorasi peluang-peluang baru. Respons kebijakan yang adaptif memungkinkan pemerintah untuk menjamin kemampuan pertahanan dan mengantisipasi risiko-risiko keamanan yang berkembang.
5. Manajemen Risiko dan Perencanaan Kontingensi: Perumusan kebijakan pertahanan yang efektif mensyaratkan manajemen risiko dan perencanaan kontingensi yang kuat. Pemikiran strategis memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi risiko dan kerawanan yang berpotensi terjadi. Sementara bukti empiris memberikan wawasan berbasis data sebagai dasar untuk mengantisipasi kemungkinan dan konsekuensi dari skenario-

skenario yang berbeda. Penelitian oleh Taliaferro et al. (2022) mengusulkan bahwa integrasi pandangan ke depan yang strategis dan analisis risiko empiris meningkatkan pembuatan keputusan dalam situasi ketidakpastian. Dengan mengembangkan rencana-rencana kontingensi berbasis bukti empiris, para pembuat kebijakan dapat memitigasi risiko, meminimalisasi kelemahan, dan menjamin kesiapan operasional dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan.

Kesimpulannya, integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris penting bagi perumusan kebijakan pertahanan yang efektif. Pemikiran strategis memberikan kerangka konseptual untuk menyusun sasaran-sasaran dan mengantisipasi tantangan-tantangan masa depan. Sementara bukti empiris menyediakan data faktual dan analisis untuk mendukung pembuatan keputusan yang terinformasi. Dengan mensintesis wawasan strategis dan analisis empiris, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi-strategi pertahanan berbasis bukti yang adaptif yang menggambarkan dinamika keamanan yang kompleks secara komprehensif. Didasarkan pada penelitian sebelumnya dan wawasan empiris, para pembuat kebijakan dapat mengarahkan ketidakpastian dan melindungi kepentingan keamanan nasional secara efektif.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan melibatkan penilaian ancaman, pemahaman kepentingan nasional, penetapan tujuan, dan mitigasi risiko. Bukti empiris sangat penting dalam pengambilan keputusan, dan pengambilan

keputusan berdasarkan data, perencanaan skenario, dan evaluasi pasca implementasi merupakan metode yang efektif. Interseksionalitas memainkan peranan penting dalam efektivitas pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertahanan berbasis bukti. Hal ini memupuk pemahaman komprehensif mengenai tantangan-tantangan pertahanan dan mendorong kebijakan-kebijakan yang menjawab beragam kebutuhan masyarakat. Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris dalam pembuatan kebijakan pertahanan sangat penting bagi negara untuk mengatasi kompleksitas keamanan global. Prinsip-prinsip seperti visi jangka panjang, pemikiran holistik, analisis cermat, penilaian realistis, manajemen risiko, kemampuan beradaptasi, dan keterlibatan multi-pemangku kepentingan dapat membantu mengembangkan kebijakan pertahanan yang kuat, terinformasi, dan kondusif.

Implikasi

Pengembangan kebijakan pertahanan yang kuat menekankan pentingnya pengintegrasian pemikiran strategis dan bukti empiris. Hal ini menekankan perlunya penelitian dan analisis mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini juga menekankan peran interseksionalitas dalam kebijakan pertahanan, mengakui keberagaman identitas dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang responsif dan inklusif, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh warga negara. Selain itu, penting untuk memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dalam kebijakan pertahanan dan memastikan kebijakan tetap relevan, dan dapat beradaptasi terhadap perubahan keamanan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abbadi, L., Alsmairat, M., Alshawabkeh, R., & Rumman, A. (2024). The impact of strategic thinking on organizational excellence: An empirical examination in Jordan's ICT sector. *International Journal of Data and Network Science*, 8(2), 1169–1178.
- Ananthapavan Id, J., Sacks Id, G., Moodie, M., Nguyen, P., & Carter, R. (2022). *Preventive health resource allocation decision-making processes and the use of economic evidence in an Australian state government-A mixed methods study*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274869>
- Andersen, T. J., Sax, J., & Giannozzi, A. (2022). Conjoint effects of interacting strategy-making processes and lines of defense practices in strategic Risk Management: An empirical study. *Long Range Planning*, 55(6), 102164.
- Angerschmid, A., Zhou, J., Theuermann, K., Chen, F., & Holzinger, A. (2022). Fairness and explanation in AI-informed decision making. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 4(2), 556–579.
- Aning, K., & Anaba, A. (2016). Intersectionality in Security Sector Management: The Case of Ghana. *Journal of Security Sector Management*, 14(2), 1–19.
- Armstrong, J. S., & Green, K. C. (2017). *Demand forecasting II: Evidence-based methods and checklists*.
- Bagilhole, B. (2010). Applying the lens of intersectionality to UK equal opportunities and diversity policies. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne Des*

- Sciences de l'Administration*, 27(3), 263–271.
- Baldino, D., & Carr, A. (2016). Defence diplomacy and the Australian defence force: smokescreen or strategy? *Australian Journal of International Affairs*, 70(2), 139–158.
- Boesso, G., Favotto, F., & Michelon, G. (2015). Stakeholder prioritization, strategic corporate social responsibility and company performance: further evidence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22(6), 424–440.
- Bolisani, E., & Bratianu, C. (2017). Knowledge strategy planning: an integrated approach to manage uncertainty, turbulence, and dynamics. *Journal of Knowledge Management*, 21(2), 233–253.
- Burton, C. (2014). Current perspectives on the intersectionality of military women. *Underserved Women of Color, Voice, and Resistance: Claiming a Seat at the Table*, 43–57.
- Cairney, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. Springer.
- Cameron, A. I., & Tedds, L. M. (2023). Canada's GBA+ framework in a (post) pandemic world: Issues, tensions and paths forward. *Canadian Public Administration*, 66(1), 7–27.
- Christensen, G., Freese, J., & Miguel, E. (2019). *Transparent and reproducible social science research: How to do open science*. University of California Press.
- Collins, P. H. (2015). Intersectionality's definitional dilemmas. *Annual Review of Sociology*, 41, 1–20.
- Costino, K. (2018). Equity-minded faculty development: An intersectional identity-conscious community of practice model for faculty learning. *Metropolitan Universities*, 29(1), 117–136.
- Crenshaw, K. (2013). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. In *Feminist legal theories* (pp. 23–51). Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Criado-Perez, C., Shinkle, G. A., Höllerer, M. A., Sharma, A., Collins, C., Gardner, N., Hank Haeusler, M., & Pan, S. (2022). Digital transformation in the Australian AEC industry: prevailing issues and prospective leadership thinking. *Journal of Construction Engineering and Management*, 148(1), 05021012.
- DACOWITS. (2020). *Annual Report*. Defense Advisory Committee on Women in the Services (DACOWITS). <https://dacowits.defense.gov/Portals/48/Documents/Reports/2020/DACOWITS-AR-2020.pdf>
- Davis, K. (2016). Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful 1. In *Framing Intersectionality* (pp. 43–54). Routledge.
- Destradi, S., Cadier, D., & Plagemann, J. (2021). Populism and foreign policy: a research agenda (Introduction). *Comparative European Politics*, 19(6), 663–682.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality

- in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dionisio, M. A. (2017). Strategic thinking: The role in successful management. *Journal of Management Research*, 9(4), 44–57.
- Elias, A. A. (2022). Multi-stakeholder participation for achieving sustainable development goals: A systems thinking approach. In *Environmental Sustainability and Agenda 2030: Efforts, Progress and Prospects* (pp. 45–65). Emerald Publishing Limited.
- Eriksson, E. A., & Weber, K. M. (2008). Adaptive Foresight: Navigating the complex landscape of policy strategies. *Technological Forecasting and Social Change*, 75(4), 462–482.
- Evans, C. J. (2016). Thinking Strategically. *Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook*, 201–211.
- Franco, C., Marzucchi, A., & Montresor, S. (2014). Absorptive capacity, proximity in cooperation and integration mechanisms. Empirical evidence from CIS data. *Industry and Innovation*, 21(4), 332–357.
- Fujiwara, T., Müller, K., & Schwarz, C. (2023). *The Effect of Social Media on Elections: Evidence from the United States* *.
- GAO. (2020). *Diversity and Inclusion: Actions Needed to Improve Evaluation of Public Health and Science Programs*. <https://www.gao.gov/assets/gao-20-346.pdf>
- General, I. (2022). *Department of Defense Office of Inspector General Fiscal Year 2022 Top Management Challenges*. https://media.defense.gov/2021/Nov/16/2002893873/-1/-1/1/ MANAGEMENT%20CHALLENGES_FY22.PDF
- George, A. L., & Stern, E. K. (2002). Harnessing conflict in foreign policy making: from devil's to multiple advocacy. *Presidential Studies Quarterly*, 32(3), 484–505.
- Ghiselli, A. (2018). Revising China's Strategic Culture: Contemporary Cherry-Picking of Ancient Strategic Thought. *The China Quarterly*, 233, 166–185.
- Giannakis, M., & Papadopoulos, T. (2016). Supply chain sustainability: A risk management approach. *International Journal of Production Economics*, 171, 455–470.
- Government of the United Kingdom. (2021). *Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy*. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971859/CP411_Integrated_Review.pdf
- Grant, R. M. (2021). *Contemporary strategy analysis*. John Wiley & Sons.
- Halevy, N. (2016). Strategic thinking. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 54, pp. 1–66). Elsevier.
- Hancock, A.-M. (2007). Intersectionality as a normative and empirical paradigm. *Politics & Gender*, 3(2), 248–254.
- Henry, M. (2017). Problematizing military masculinity, intersectionality and male vulnerability in feminist critical military studies. *Critical Military Studies*, 3(2), 182–199.

- Holling, C. S., & Walters, C. (1978). *Adaptive environmental assessment and management*.
- Howard, M. (2018). The classical strategists (1969). *Adelphi Series*, 58(472-474), 179-214.
- Hutchings, R. L., & Treverton, G. F. (2022). *Rebuilding Strategic Thinking*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Institute for Economics and Peace. (2021). *Global Peace Index 2021: Measuring Peace in a Complex World*. <http://visionofhumanity.org/reports>
- Jaiswal, J., & Mumba, M. N. (2022). The role of nursing in loosening the pervasive grip of intersectional stigma. *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*, 60(12), 9-15.
- Kaplan, S., & Garrick, B. J. (1981). On the Quantitative Definition of Risk. *Risk Analysis*, 1(1), 11-27.
- Klinke, I. (2015). *European geopolitics after the crisis*. Taylor & Francis.
- Laurin, J. E. (2014). Gideon by the numbers: The emergence of evidence-based practice in indigent defense. *Ohio St. J. Crim. L.*, 12, 325.
- Lee, C.-C., Olasehinde-Williams, G., & Akadiri, S. Saint. (2021). Are geopolitical threats powerful enough to predict global oil price volatility? *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 28720-28731.
- Lösing, F., Intersectionality, W., Bilge, S., Maeso, S. R., & Araújo, M. (n.d.). *Ifor a discussion of the collage see the editorial*.
- Michalski, A. (2019). Diplomacy in a changing world order: The role of strategic partnerships. *Diambil Kembali Dari The Swedish Institute of International Affairs: <https://www.Ui.Se/Globalassets/Ui.Se-Eng/Publications/Ui-Publications/2019/Ui-Paper>*, 10-2019.
- Moneta, L. (2017). Intersectionality in student affairs: Perspective from a senior student affairs officer. *New Directions for Student Services*, 2017(157), 69-79.
- Nosek, B. A., Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (2002). Harvesting implicit group attitudes and beliefs from a demonstration web site. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 6(1), 101.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *Review of International Studies*, 2(3), 246-266.
- Parthasarthy, R., & Sethi, S. P. (2018). The impact of flexible automation on business strategy and organizational structure. In *Organizational Innovation* (pp. 319-344). Routledge.
- Pew Research Center. (2020). *National Security and Defense*. <https://www.pewresearch.org/topics/national-security-and-defense/>
- Razma, G. (2023). Strategic Facts as a Comprehensive Model for Defence Analysis. *Defence Studies*, 23(2), 254-273.
- Rohall, D. E., Ender, M. G., & Matthews, M. D. (2017). Diversity in the military. *Inclusion in the American Military: A Force for Diversity*, 1-16.
- Sarjito, A. (2023a). Evaluation of Indonesian Government Policies in Addressing Climate Change and Natural Disasters. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 103-124.

- Sarjito, A. (2023b). In The Shadows of Governance: Exploring the Untamed Territories of Administrative Discretion. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 295–310.
- Sarjito, I. A., Djati, S. P., & Th, M. (2023). *Manajemen Pertahanan*. Indonesia Emas Group.
- Schlaile, M. P., & Urmetzer, S. (2019). Transitions to sustainable development. *Decent Work and Economic Growth*, Springer International Publishing.
- Schwartz, J. L. (2020). Evaluating and deploying COVID-19 vaccines—The importance of transparency, scientific integrity, and public trust. *New England Journal of Medicine*, 383(18), 1703–1705.
- Settembre-Blundo, D., González-Sánchez, R., Medina-Salgado, S., & García-Muiña, F. E. (2021). Flexibility and resilience in corporate decision making: a new sustainability-based risk management system in uncertain times. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 22(Suppl 2), 107–132.
- Simon, H. A. (1957). *Models of man; social and rational*.
- Slim, H. (2018). *Impartiality and Intersectionality*.
<https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/01/16/impartiality-and-intersectionality/>
- Smith, S., & Stavrevska, E. B. (2022). A different Women, Peace and Security is possible? Intersectionality in Women, Peace and Security resolutions and national action plans. *European Journal of Politics and Gender*, 5(1), 63–82.
- Smithson, M. (2017). Risk Assessment and Contingency Planning in Defense Policy Making. *Defense Analysis Quarterly*, 12(1), 78–94.
- Steenkamp, M. M. (2016). True evidence-based care for posttraumatic stress disorder in military personnel and veterans. *JAMA Psychiatry*, 73(5), 431–432.
- Steff, R. (2016). *Strategic thinking, deterrence and the US ballistic missile defense project: from Truman to Obama*. Routledge.
- Swalwell, E. M., & Alagood, R. K. (2021). Homeland security twenty years after 9/11: Addressing evolving threats. *Harv. J. on Legis.*, 58, 221.
- Taliaferro, A. C., Gonzalez, L. M., Tillman, M., Ghosh, P., Clarke, P., & Hinkle, W. (2022). *Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions A Guide to Capability-Based Planning (CBP)*. Institute for Defense Analyses.
- Tan, A. S. L., Hinds, J. T., Smith, P. H., Antin, T., Lee, J. P., Ostroff, J. S., Patten, C., Rose, S. W., Sheffer, C. E., & Fagan, P. (2023). Incorporating intersectionality as a framework for equity-minded tobacco control research: a call for collective action toward a paradigm shift. *Nicotine and Tobacco Research*, 25(1), 73–76.
- Troisi, O., Maione, G., Grimaldi, M., & Loia, F. (2020). Growth hacking: Insights on data-driven decision-making from three firms. *Industrial Marketing Management*, 90, 538–557.
- Waddell, C., Shepherd, C., Schwartz, C., & Barican, J. (2014). Child and youth mental disorders: prevalence and

- evidence-based interventions. *Vancouver, BC: Children's Health Policy Centre, Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University.*
- Wagner Mainardes, E., Ferreira, J. J., & Raposo, M. L. (2014). *Strategy and strategic management concepts: are they recognised by management students?*
- Walter, B. F., & Huth, P. K. (2020). What the Data Say about the Risks of Civil War. *Journal of Conflict Resolution*, 64(1), 54–89.
- Wang, J., Errapotu, S. M., Gong, Y., Qian, L., Jäntti, R., Pan, M., & Han, Z. (2018). Data-driven optimization based primary users' operational privacy preservation. *IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking*, 4(2), 357–367.
- Wang, W., Sun, D., Jiang, F., Chen, X., & Zhu, C. (2022). Research and challenges of reinforcement learning in cyber defense decision-making for intranet security. *Algorithms*, 15(4), 134.
- Weyhrauch, W. S., & States, C. O. F. U. W. D. C. W. D. C. U. (2017). Development and preliminary validation of the Strategic Thinking Mindset Test (STMT). *Washington DC: Consortium of Universities Washington DC.*
- Wilkinson, A. (2017). Strategic foresight primer. *European Political Strategy Centre.*
- Wright, A. L., Zammuto, R. F., Liesch, P. W., Middleton, S., Hibbert, P., Burke, J., & Brazil, V. (2016). Evidence-based management in practice: Opening up the decision process, decision-maker and context. *British Journal of Management*, 27(1), 161–178.